

Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare

Nurasisah

Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey, wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare pada tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan yang baik, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan dan pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penerimaan daerah di Kota Parepare terlebih khusus dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah masih perlu di optimalkan dengan baik. (2) Ada dua cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PAD di Kota Parepare. Cara tersebut ialah mengoptimalkan dan menyempurnakan penerimaan dari pajak daerah retribusi daerah yang sudah ada, dan membuat dan menerapkan perda baru dengan tujuan untuk menambah pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah

Copyright (c) 2023 Nurasisah

✉ Corresponding author :

Email Address : Nurasisah@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan penyelenggaraan sistem otonomi daerah. Peran pendapatan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan sistem otonomi daerah dimana semakin besar penerimaan atau pendapatan dari suatu daerah semakin baik pula penyelenggaraan otonomi daerah dari daerah tersebut.

Pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah yang tidak membebani dunia usaha dan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah menjadi poin penting dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah dikarenakan pajak menjadi sumber pendapatan terbesar. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan menyederhanakan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah, pemungutan pajak dan menguatkan sistem pengawasan pemungutan pajak, agar menciptakan efektivitas, efisiensi dan kualitas dalam peningkatan pelayanan.

Peningkatan pendapatan asli daerah menjadi salah satu modal keberhasilan dalam peningkatan suatu daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah dapat pula meningkatkan pembangunan dalam suatu daerah. hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah yang menentukan kemampuan suatu daerah dalam menjalankan fungsi

pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 yaitu tentang pajak dan retribusi daerah.

Setiap daerah harus diberi kewenangan untuk menetapkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah sendiri, dan kebebasan untuk mengatur tarif berdasarkan kemampuan dari daerah masing-masing. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap harus memperhatikan prinsip demokrasi yang adil agar tidak membebani masyarakat agar dapat memaksimalkan potensi dari daerah itu sendiri.

Masalah dalam peningkatan daerah masih relatif sama meskipun telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang nomor 3, Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Masalah yang ditemukan masih sama, yaitu pendapatan dari setiap daerah hanya bisa mencapai 37,8% dari total masing-masing daerahnya. Tidak ada daerah yang dapat memberikan sumbangan 70% pendapatan asli daerah dari daerah masing-masing. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa daerah masih belum menunjukkan kemandirian dan masih bergantung pada dana yang telah disediakan oleh pusat untuk dana pembangunan.

Penyebab pertama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah biasanya pemerintah tidak dapat menentukan atau memaksimalkan potensi dalam menentukan sumber pendapatan. Yang kedua, pemerintah daerah masih belum dapat mengoptimalkan perolehan dari pendapatan pajak, retribusi atau bahkan perolehan dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketiga, pemerintah daerah masih yakin bahwa pendapatan daerah rendah karena ruang yang terbatas dalam meningkatkan pendapatan. Sesuai dengan undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, daerah melihat bahwa terdapat banyak hal yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pendapatan, namun hal tersebut dibatasi oleh undang-undang yang berlaku. Keempat, daerah masih meyakini bahwa potensi pendapatan terbesar pajak masih diawasi, diantaranya pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak rokok. Kelima, sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masyarakat menyadari bahwa sistem yang belum sepenuhnya integritas dan masih minimnya sumber daya manusia yang dapat dipungut oleh pajak. Sumber daya manusia yang terkait dengan pajak dan retribusi sangat penting untuk dipahami, karena sumber daya manusia pada bidang ini harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat dan dapat memberikan pemahaman bahwa pentingnya pajak dan retribusi untuk mendukung kualitas sumber daya manusia agar dapat membentuk sistem otonomi daerah yang baik.

Terlebih halnya di Kota Parepare, Pendapatan asli daerah merupakan hal yang harus dioptimalkan dengan baik oleh pemerintah, sebab hal ini merupakan sumber dana pembangunan infrastruktur dan segala kelengkapan aparatur pemerintahan terkhusus di Kota Parepare, maka dari itu pemerintah sebagai pengelola dan badan pengawas dalam mengumpulkan pendapatan tersebut. Persoalan utama yang sangat serius dalam hal pendapatan asli daerah adalah banyaknya pejabat yang biasanya bermain api dalam pengelolaannya sehingga pendapatan asli daerah dalam pengumpulan terkadang tidak efektif disebabkan oleh hal tersebut, banyaknya oknum pemerintah yang biasanya menggelapkan dana yang berkucuran dari hasil pajak rakyat, dengan

demikian hal ini harus menjadi perhatian sebab ini bukan masalah daerah, nasional bahkan masalah yang sifatnya global. Korupsi menjadi masalah yang sangat serius di negara dan tempat manapun, dikarenakan korupsi dapat merugikan negara dengan jumlah yang tidak sedikit dan tentunya dapat melumpuhkan pembangunan dalam sebuah negara.

Pendapatan asli daerah seharusnya menjadi suatu hal dikelola secara baik oleh pemerintah daerah sehingga penggunaannya secara berkala dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun terkadang yang menjadi persoalan yang mendasar yakni kurangnya peran pemda dalam menggunakan secara bijak pendapatan tersebut sehingga terkadang segala bentuk hasil dari pengelolaan pendapatan daerah bersifat tumpang tindih dan tidak merata sehingga masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan tidak ikut merasakan hasil dari pajak yang setiap tahunnya mereka bayar. Tentunya banyak hal yang menyebabkan terjadinya hal demikian, sebagaimana penulis jelaskan di paragraf sebelumnya. Maka peran penting pemda dalam optimalisasi dana tersebut menjadi hal yang sangat di harapkan oleh segenap elemen masryakat yang ada terkhusus masyarakat kecil yang jauh dari pusat perkotaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 1. Hasil Penelitian

Dalam hasil penelitian ini akan menyajikan data tentang perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare selama beberapa tahun terakhir mulai dari tahun 2015 – 2019 dan upaya dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

No	Kode Informan	Jabatan
1	Informan 1	Bidang Pendapatan
2	Informan 2	Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
3	Informan 3	Sub Bidang Pemeriksaan

Sumber : BKD Kota Parepare, Data Diolah)

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. Total Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare mulai tahun 2015 – 2019 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5.2 Total PAD Kota Parepare

Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Realisasi	% Angg.
1.	2015	122.188.461.211.00	115.528.109.952.35	94,55

2.	2016	138.051.117.571.0 0	136.312.870.315.7 3	98,77
3.	2017	140.990.173.492.0 0	140.621.664.388.4 8	99,74
4.	2018	150.834.948.804.0 0	133.614.135.918.7 6	88,58
5.	2019	156.982.471.858.0 0	137.762.156.697.5 2	87,76

Sumber : BKD Kota Parepare, Data Diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PAD di Kota Parepare terjadi peningkatan di setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 – 2019. Tahun 2017 menjadi tahun dengan persen penggunaan anggaran tertinggi yaitu sebesar 99,74% dengan total anggaran sebesar Rp. 140.990.173.492.00 dan total realisasi sebesar Rp. 140.621.664.388.48. Sedangkan tahun 2019 menjadi tahun dengan persen penggunaan anggaran terendah yaitu sebesar 87,76% dengan total anggaran sebesar Rp. 156.982.471.858.00 dan realisasi sebesar Rp. 137.762.156.697.52

Adapun total pendapatan dari sumber-sumber PAD dari tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Total Pajak di Kota Parepare

Tahun 2015 – 2019

N O	Tahun	Anggaran	Realisasi
1.	2015	19.317.500.000.00	21.408.339.144.00
2.	2016	19.337.500.000.00	22.526.393.836.00
3.	2017	20.610.000.000.00	27.856.992.427.00
4.	2018	27.500.000.000.00	30.348.994.083.75
5.	2019	31.975.000.000.00	33.921.012.865.90

Sumber : BKD Kota Parepare, Data Diolah)

Pada tabel 5.3 dapat dilihat total perkembangan pajak di Kota Parepare. Total realisasi pajak terendah berada pada tahun 2015 dengan total realisasi sebesar Rp. 21.408.339.144.00 dari target anggaran sebesar Rp.19.317.500.000.00. Sedangkan total realisasi pajak tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.33.921.012.865.90 dari target anggaran sebesar Rp. 31.975.000.000.00.

Tabel 3

Jumlah Total Retribusi Daerah di Kota Parepare

Tahun 2015 – 2019

N O	Tahun	Anggaran	Realisasi
1.	2015	13.060.085.150.00	7.641.215.984.51
2.	2016	11.336.838.838.00	8.510.259.991.00
3.	2017	7.162.925.200.00	7.504.251.331.00
4.	2018	6.976.105.000.00	6.897.973.476.00
5.	2019	7.888.669.150.00	7.491.714.379.00

Sumber : BKD Kota Parepare, Data Diolah)

Pada tabel 5.4 dapat dilihat total perkembangan retribusi daerah di Kota Parepare. Total realisasi retribusi daerah terendah berada pada tahun 2018 dengan total realisasi sebesar Rp. 6.897.973.476.00 dari total target anggaran sebesar Rp. 6.976.105.000.00. Sedangkan total realisasi retribusi daerah tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 8.510.259.991.00 dari target anggaran sebesar Rp. 11.336.838.838.00.

Tabel 5. Jumlah Total Hasil Kekayaan Alam yang di Pisahkan di Kota Parepare Tahun 2015 – 2019

N O	Tahun	Anggaran	Realisasi
1.	2015	4.274.436.038.00	4.274.436.038.00
2.	2016	5.000.000.000.00	5.322.500.621.00
3.	2017	6.146.087.772.00	6.176.087.772.87
4.	2018	6.473.337.284.00	6.473.337.284.00
5.	2019	6.935.032.137.00	6.935.032.137.00

Sumber : BKD Kota Parepare, Data Diolah)

Pada tabel 5.5 dapat dilihat total perkembangan Hasil Kekayaan Alam yang di pisahkan di Kota Parepare. Total realisasi kekayaan alam yang di pisahkan terendah berada pada tahun 2015 dengan total realisasi sebesar Rp. 4.274.436.038.00 dari target anggaran sebesar Rp. 4.274.436.038.00. Sedangkan total realisasi hasil kekayaan alam yang di pisahkan tertinggi berada pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 6.935.032.137.00 dari target anggaran sebesar Rp. 6.935.032.137.00.

Tabel 6. Jumlah Total Lain-lain PAD yang Sah di Kota Parepare Tahun 2015 – 2019

N O	Tahun	Anggaran	Realisasi
1.	2015	85.536.440.023.00	82.204.118.785.42
2.	2016	102.340.778.733.00	99.953.715.867.73
3.	2017	107.071.160.520.00	99.084.332.857.61
4.	2018	111.747.445.202.47	87.888.673.163.00
5.	2019	110.183.770.571.00	89.414.397.316.00

Sumber : BKD Kota Parepare, Data Diolah)

Tabel 5.6 memperlihatkan total perkembangan lain-lain PAD yang sah di Kota Parepare. Total realisasi lain-lain PAD yang sah terendah berada pada tahun 2015 dengan total realisasi sebesar Rp. 82.204.118.785.42 dari target anggaran sebesar Rp. 85.536.440.023.00. Sedangkan total realisasi lain-lain PAD yang sah tertinggi berada pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 99.953.715.867.73 dari target anggaran sebesar Rp. 102.340.778.733.00.

Setelah mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan peneliti kemudian melakukan wawancara kepada informan yang telah di tentukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah Kota. Adapun hasil wawancara disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang menjadi sumber PAD di Kota Parepare	Sumber-sumber PAD di Kota Parepare a. Pajak b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yang di Pisahkan d. Lain-lain PAD yang sah
2.	Ada berapa Pajak yang di berlakukakan di Kota Parepare dan bagaimana pengaruhnya terhadap PAD	Terdapat 10 jenis pajak yang diberlakukan di Kota Parepare. Pajak memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan PAD Kota Parepare di karenakan pendapatan dari Pajak yang sudah terbilang tinggi.
3.	Bagaimana perkembangan pajak di Kota Parepare selama lima tahun terakhir	Perkembangan Pajak di Kota Parepare ini sudah terbilang baik. Hal itu dikarenakan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi di setiap tahunnya.
4.	Ada berapa Retribusi yang berlaku di Kota Parepare dan seberapa besar pengaruhnya terhadap PAD	Retribusi di Kota Parepare terbagi menjadi tiga jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi juga memiliki pengaruh terhadap PAD namun pengaruhnya jika di bandingkan dengan Pajak masih terbilang jauh.

5.	Bagaimana perkembangan Retribusi Daerah di Kota Parepare	Perkembangan retribusi daerah Kota Parepare tidak bias dikatakan baik. Hal ini dikarenakan retribusi daerah Kota Parepare setiap tahun mengalami penurunan Bersambung
6.	Seberapa besar pengaruh Lain-Lain PAD yang sah terhadap perkembangan PAD	Lain-lain PAD yang sah sangat berpengaruh penting karena menduduki posisi tertinggi dalam hal penerimaan pendapatan.
7.	Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PAD di Kota Parepare	a. Mengoptimalkan dan menyempurnakan penerimaan pajak dan retribusi daerah b. Mencari Sumber Daya Baru

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan masalah Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Hal tersebut diakibatkan dikarenakan adanya sumber-sumber PAD di Kota Parepare yang mengalami peningkatan dan penurunan. Meskipun terdapat sumber-sumber yang mengalami peningkatan akan tetapi terdapat dari sumber-sumber PAD yang lainnya juga mengalami penurunan. Selain itu, peningkatan dari PAD Kota Parepare juga dipengaruhi oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PAD di Kota Parepare. Sumber PAD yang paling berpengaruh ialah sumber dari lain-lain PAD yang sah. Tabel 5.2 memperlihatkan total dari PAD Kota Parepare. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa persentase penggunaan anggaran pada tahun 2015 - 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, persentase penggunaan anggaran mengalami penurunan yang drastis yaitu 88,58% dengan realisasi sebesar Rp. 133.614.135.918.76, kemudian hingga tahun 2019 masih mengalami penurunan hingga mencapai angka 87,76%, namun pada tahun 2019 realisasi PAD lebih tinggi dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 137.762.156.697.52. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya sumber-sumber PAD yang mengalami fase naik turun yang mengakibatkan realisasi dari PAD menjadi ikut mengalami fase naik turun. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan menjelaskan tentang sumber-sumber dari PAD itu sendiri.

1. Sumber-Sumber PAD di Kota Parepare

Sumber-sumber PAD di Kota Parepare terbagi menjadi empat (4), yaitu pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan alam dan lain-lain PAD yang sah. Berikut ini adalah penjelasan mengenai sumber-sumber PAD yang ada di Kota Parepare :

a. Pajak

Pajak di Kota Parepare terbagi menjadi 10, diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak menjadi sumber yang memberikan pengaruh besar terhadap PAD di Kota Parepare. Pendapatan pajak yang setiap tahunnya memperoleh angka tertinggi ke 2 dari sumber-sumber PAD lainnya dan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadikan pajak sebagai sumber PAD yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan PAD di Kota Parepare. Pada tabel 5.3 diketahui bahwa peningkatan anggaran pajak tertinggi terjadi antara tahun 2017 – 2018 dan peningkatan terendah berada antara tahun 2015 – 2016. Salah satu indikator penting dalam peningkatan pajak adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). PPJ menjadi pajak yang memiliki pendapatan tertinggi di antara pajak-pajak lain yang ada di Kota Parepare dengan total penghasilan mencapai 6 Miliar mengalahkan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang hanya mencapai 4 Miliar.

Pada tabel 5.3 dapat dilihat adanya perbedaan antara target anggaran dengan realisasi. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya pembayaran pajak yang secara umum terjadi di setiap tahun sehingga melebihi dari target anggaran. Seperti yang telah di jelaskan pada paragraf sebelumnya, PPJ menjadi indikator penting dalam perkembangan pajak. Peningkatan PPJ disebabkan karena adanya pembuatan lorong peduli yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak penerangan jalan yang dikenakan. Disamping itu, pembangunan lampu jalan di beberapa ruas jalan Kota Parepare juga menjadi faktor penyebab meningkatnya PPJ di Kota Parepare.

b. Retribusi Daerah

Retibusi daerah kota Parepare terbagi menjadi 3 Jenis, yaitu retibusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terbagi menjadi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan kebersihan, retribusi parkir ditepi jalan, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi jasa usaha terbagi menjadi, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat rekreasi/pariwisata, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, mess Pemda/Villa penginapan, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi rumah potong hewan. Sedangkan retribusi perizinan tertentu terbagi menjadi, retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), retribusi Izin Gangguan/Keramaian (SITU), retribusi izin Trayek dan retribusi pelayanan Alat Ukur Timbangan (UUTP).

Retribusi Daerah di Kota Parepare berada pada posisi ke tiga dalam hal penerimaan pendapatan. Pada tabel 5.4 dilihat bahwa retribusi daerah di kota Parepare mengalami pasang surut. Tabel 5.4 memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup jauh antara realisasi dan target anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa retribusi jasa umum yang mengalami fase naik turun, seperti contohnya retribusi pelayanan kesehatanyang pada tahun 2015 hanya menuai 14% dari target anggaran dan pada tahun 2017 kembali naik menjadi 108% dari target anggaran. Penyebab lain naik turunnya anggaran tersebut disebabkan adalah retribusi parkir. Sebagai contoh pasar Lakessi yang menjadi salah satu sumber retribusi parkir. Pendapatan dari retribusi parkir bergantung pada kendaraan yang singgah atau pembeli yang datang, jadi semakin banyak kendaraan yang parkir maka pendapatan retribusi parkir juga akan meningkat, begitupun sebaliknya jika kendaraan yang di parkir kurang maka pendapatan juga akan berkurang. Selain itu, Pasar Lakessi termasuk pasar mingguan yang hanya terbuka pada hari-hari tertentu dan menjadikan retribusi parker terkdang

naik dan terkadang turun. Sebagai contoh lain penyebab naik turunnya retribusi parkir ialah tempat-tempat hiburan masyarakat yang terkadang ramai terkadang tidak. Lapangan Andi Makasau yang selalu ramai di datangi masyarakat akan memperoleh pendapatan tinggi pada hari libur, dan pendapatan akan berkurang pada hari kerja atau kantor.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yang di Pisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yang di Pisahkan di Kota Parepare yaitu Perusahaan Milik Daerah/BPD SULSEL (DIVIDEN). Perolehan pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yang di Pisahkan menjadi urutan terakhir dalam urutan penerimaan pendapatan. Hal tersebut menjadi suatu kewajiban dikarenakan sumber dari pendapatannya hanya terdapat satu jenis. Tabel 5.5 memperlihatkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yang di Pisahkan setiap tahun mengalami peningkatan meskipun peningkatannya masih terbilang rendah namun peningkatan tersebut sudah terbilang baik.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah yaitu Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Dana Atas Keterlambatan Pelaku Pekerja, dan penerimaan lain-lain.

Lain-lain PAD yang sah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah tertinggi diantara sumber-sumber PAD yang lainnya dan menjadi pengaruh terbesar bagi PAD di Kota Parepare. Lain-lain PAD yang sah setiap tahun mengalami hal yang serupa dengan retribusi daerah yaitu mengalami pasang surut meskipun tidak sama persis pasang surut yang dialami retribusi daerah. Dilihat pada tabel 5.6, pada awal tahun penelitian hingga tahun ketiga penelitian terjadi peningkatan pendapatan. Namun, tahun berikutnya mengalami penurunan dan disusul peningkatan pada tahun berikutnya. Indikator penting dalam peningkatan tersebut dikarenakan adanya penerimaan dari Pendapatan BLUD RSUD Andi Makkasau yang setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang tinggi. Hal tersebut berefek kepada Lain-lain PAD yang sah sehingga menyebabkan kenaikan pada sumber PAD yang satu ini.

Pada table 5.6 memperlihatkan adanya perbedaan antara realisasi dengan target anggaran. Pendapatan dari lain-lain PAD yang sah secara umum telah mencapai bahkan melebihi target anggaran. Pada tahun 2016 Penerimaan Jasa Giro mencapai 205% dari target anggaran, disisi lain pada penerimaan lain-lain Disperindag hanya mampu mencapai 3% dari target anggaran. Namun, penyebab utama yang menyebabkan perbedaan tersebut dikarenakan faktor penerimaan Pendapatan BLUD RSUD Andi Makkasau. Penerimaan Pendapatan BLUD RSUD Andi Makkasau setiap tahun mengalami fase naik turun akan tetapi pendapatannya yang diperoleh terbilang sangat tinggi yang mampu mencakup sekitar 85% dari total pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2. Upaya dalam meningkatkan PAD di Kota Parepare

Ada dua cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PAD di Kota Parepare. Cara tersebut ialah mengoptimalkan dan menyempurnakan penerimaan dari pajak daerah retribusi daerah yang sudah ada, dan mencari sumber daya baru.

- a. Mengoptimalkan dan menyempurnakan penerimaan pajak dan retribusi daerah

Cara Pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengoptimalkan dan menyempurnakan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Proses disini mengacu pada proses operasi dan proses manajemen yang tertib. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare adalah mengoptimalkan pungutan jenis pajak dan retribusi daerah yang telah memiliki Perda dan mencegah tingkat kebocoran yang dilakukan oleh juru tagih sebelum di setor ke kas daerah serta melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah yang lama.

- b. Menerapkan peraturan daerah baru

Upaya lain dalam meningkatkan PAD yaitu mengoptimalkan pendapatan daerah dengan mencari sumber daya baru. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah melakukan inovasi dalam menaikkan pajak daerah. Upaya yang dilakukan selain dari mencari sumber penerimaan baru adalah dengan melakukan kebijakan investasi dan kerja sama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan daerah, hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dengan melihat peningkatan investor-investor asing yang masuk, salah satunya ialah pada tahun 2019 investor yang berasal dari Singapura yang melakukan kerja sama dengan pemerintah kota Parepare untuk membangun hotel berbintang dan *convetion hall* atau ruang pertemuan representatif di tengah Kota Parepare. Walikota HM.

SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare pada tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan yang baik, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan dan pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penerimaan daerah di Kota Parepare terlebih khusus dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah masih perlu di optimalkan dengan baik

Referensi :

- Aga Khaitari. 2008. *Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum ("Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Parepare")*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia:Yogyakarta.
- Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andini Annida Zahra. *Jojonomic*. artikel diakses tanggal 06 November 2019, dari <https://jojonomic.com/blog/pendapatan-asli-daerah/>
- Ayu IndrawaniSri. 2019. *Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pariaman Dari Tahun 2011-2017*. Jurnal. Universitas Andalas: Padang.
- Bodgan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian dalam moleong pendekatan kualitatif*. Jakarta
- Bohari, *Pengantar Hukum Retribusi, Edisi Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Data Kata. *Databoks*. Artikel di akses tanggal 14 November 2019, dari

<https://www.sulselsatu.com/2019/07/18/sulsel/ajattapareng/segini-besaran-pendapatan-daerah-parepare-di-apbd-p-2019.html>

- Datu Indra Rindu. 2012. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makassar Tahun 1999-2009*. Skripsi. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Erly Suandy, *Peretribusian*, Jakarta : Salemba Empat, 2002.
- Erni Purnama Sari. 2011. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Gresik. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jatim: Surabaya.
- Faozi Pradana PutraRizal. 2016. *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cilacap*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.
- FawaidurrohmanAhmad. 2019. *Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Apbd Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018*. Jurnal. Universitas Islam Malang: Malang.
- Gunadi, *Retribusi Daerah*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta, 1997.
- Halim, Abdul. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT Grasindo:Jakarta.
- Lailatul Mubasiroh. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Laurens Derosario BerwuloLuigi. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado: Manado
- Lestari Suci. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Soppeng Periode 2005-2014*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
- Perpres No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- RahmadaniAnnisya. 2018. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batu Bara. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Ristia KaengAprisilia. 2015. Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado: Manado.
- Soraya Tila. 2018. Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Di Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2012-2016. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan.